LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

2017

PERDA NOMOR 50 BD 2017 / NO 415, 10 HLM

PERWAL TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 - Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 23 UU No 28 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2001; UU No 30 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010 PKPK No 7 Tahun 2016; Perda Kota Tasik No 5 Tahun 2016; Perda Kota Tasik No 7 Tahun 2016; Perwal Kota Tasik No 40 Tahun 2016; Perwal Kota Tasik 52 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup hal-hal yang meliputi : Wajib lapor; Penyampaian LHKPN; Pengelola LHKPM; dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2017
 - Penyampain LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya.